

POLARISASI GEO POLITIK KERAJAAN DI BALI ABAD XVI-XX

Oleh

Desak Made Oka Purnawati
Jurusan S1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dua masalah pokok, yaitu : pertama, mengapa terjadi polarisasi geopolitik kerajaan di Bali pada periode abad XVI sampai XX, yang ditunjukkan oleh faktor internal dari kerajaan-kerajaan di Bali dan kedua, menunjukkan faktor campur tangan Belanda yang mempercepat proses polarisasi geopolitik di Bali. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan memakai metode penelitian sejarah yang meliputi : heuristik dalam pengumpulan data, kritik ekstern dan intern untuk menentukan keabsahan dan keakuratan data, interpretasi untuk menganalisis dan mensintesis data-data yang sudah di dapat dan selanjutnya, historiografi dengan menyusun suatu cerita sejarah dengan memperhatikan prinsip-prinsip kausalitas, kronologis, serialisasi dan koligasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi geopolitik Kerajaan Bali pada abad XVI-XX mengalami fragmentasi dalam sembilan kerajaan kecil yang sekarang menjadi warisan dari geopolitik kabupaten/kota di Bali. Fragmentasi ini lebih disebabkan oleh perebutan hegemoni politik diantara kerajaan kerajaan kecil di Bali sehingga memudahkan campur tangan pemerintah colonial Belanda untuk menguasainya yang dimulai saat penyerangan terhadap Kerajaan Buleleng, dan mengakhirinya dengan Perang Puputan Badung (1906) dan Perang Puputan Klungkung (1908).

Kata-kata kunci : Polarisasi, geopolitik, kerajaan

ABSTRACT

This research is aimed at examining two major problems; firstly, why kingdom geopolitical polarization occurred in Bali in the periode of 15th until 20th century, which was indicated from internal factors of Balinese kingdoms; and secondly, to argue the role of the Dutch colony in the exhilaration of the process of geopolitical polarization in Bali. This study employs an historical research method that include: heuristics in the data collection, external and internal critics in order to consider the legality and accuracy of the data; interpretation for analyzing and synthesizing the collected data, and historiography by which historical stories are composed taking into consideration the principles of causality, chronology, serialization, and coligazion. Research findings indicate

that geopolitical polarization in Balinese kingdoms during the periods between the 16th and 20th centuries went through fragmentation into nine small kingdoms that are now become the heritage in the geopolitical regencies/towns in Bali. This fragmentation is more likely to be caused by competition to win the political hegemony among the small kingdoms in Bali, therefore, it makes it easier for the Dutch colony to play their role to colonize the area which was begun in an attack towards Buleleng Kingdom and finished with Puputan Badung War (1906) and Puputan Klungkung (1908).

Keywords: polarization, geopolitics, kingdom

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap perkembangan Bali pada masa kini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kita terhadap masa lalu. Berbagai perkembangan masa lalu mewarnai perkembangan sejarah Bali pada masa kini (Ardana,1994; 17). Salah satunya adalah dinamika geopolitik kerajaan-kerajaan di Bali setelah Bali dikuasai oleh Majapahit di awal pertengahan abad ke 14. Saat terbentuknya kekuasaan politik baru menggantikan dinasti Bali Kuno maka dimulailah satu fase baru dari terbentuknya Kraton Samprangan yang menempatkan Sri Kresna Dalem Kepakisan sebagai dinasti penguasa baru atas Pulau Bali.

Namun setelah itu terutama di sekitar abad ke XVI sampai awal Abad XX geopolitik kerajaan-kerajaan di Bali mengalami suatu polarisasi yang menarik untuk dikaji, bukan saja karena periode ini penuh dengan intrik-intrik politik di kerajaan yang berimplikasi kepada terjadinya perpecahan di pusat kerajaan (kraton) tetapi juga berpengaruh terhadap kemunculan kraton-kraton baru di luar pusat kerajaan yang menjadikan Bali dengan struktur kerajaan Gelgel yang oleh Sidemen disebut sebagai struktur negara kesatuan yang terdesentralisasi, sedangkan secara struktur politik Kerajaan Klungkung lebih mendekati struktur federasi (Sidemen, 1983;6).

Kenyataan di atas tampak ketika pusat pemerintahan di Bali kembali mengalami perpindahan dari Kraton Samprangan dan dipusatkan di Gelgel. Akibat suatu pemberontakan serius di Kraton Gelgel pada tahun 1686-1687 istana yang utama pindah ke Klungkung. Kraton tersebut diberi nama Suweca Pura. Adapun raja pertama di Kraton Suweca Pura merupakan penerus Dinasti Kepakisan yang

turun temurun dari Majapahit. Setelah berpindah, Gelgel dirajam tiga pemberontakan berturut-turut. Pemberontakan Ki Batan Jeruk, Ki Patih Bhasa dan Pemberontakan Patih Maruti. Kerajaan Gelgel akhirnya goyah. Di Gelgel tidak ada lagi raja yang sekuat Dalem Waturenggong yang mengantarkan kerajaan ini meraih keemasannya dimana kekuasaannya meliputi : Blambangan, Bali, Lombok dan Sumbawa. Saat itu Bali telah menjadi kerajaan yang mandiri, karena tidak lagi berada dibawah kekuasaan Majapahit yang sudah semakin senja. Sepeninggal Dalem Waturenggong di tahun (1550), Bali kian rapuh, perlahan-lahan kerajaan ini hancur dari dalam. Gelgel pun berangsur pecah, membuka peluang munculnya kerajaan kecil yang saban hari tak henti bertikai. Betapa panjang pertikaian diantara kerajaan-kerajaan kecil itu, yang pada intinya merupakan perang saudara. Pada paro akhir abad ke- 19 misalnya, Klungkung hampir berada dalam kondisi peperangan yang konstan dengan Karangasem dan Gianyar. Kerajaan Buleleng dan Bangli terus menerus terlibat pertikaian, dan pada tahun 1849, Bangli membantu Belanda dalam ekspedisi militer melawan Buleleng, pada tahun yang sama Raja Karangasem dibunuh pasukan Bali dari Kerajaan Mataram di Lombok, antara tahun 1849-1879 Kerajaan Jembrana dan Buleleng diguncang pemberontakan dan perebutan kekuasaan internal, Mengwi ditaklukkan oleh koalisi kerajaan Badung, Gianyar dan Tabanan, pada tahun 1891 kerajaannya dibagi-bagi antara ketiga kerajaan koalisi pemenang perang. Antara tahun 1886 hingga 1993 seorang Kepala Distrik, Dewa Manggis memimpin pemberontakan sengit untuk membebaskan Gianyar dari kekuasaan Klungkung. Setelah tahun 1893 Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem mengacau Gianyar, dan pada tahun 1904, Bangli menyerang Karangasem dan menghancurkan garapan irigasi di sekitar Gianyar. Awalnya pada abad ke -19 di Bali terdapat sembilan kerajaan yaitu : Kerajaan Buleleng, Jembrana, Tabanan, Mengwi, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung dan Karangasem yang juga saling terus bertikai berebut kekuasaan, Pada tahun 1808 Kerajaan Jembrana ditaklukkan oleh Raja Buleleng dan pada tahun 1818 Jembrana dapat kembali merebut kekuasaannya. Tiga tahun berikutnya 1821 Buleleng kembali merebut Jembrana, sehingga di Bali ada delapan kerajaan.

Ditengah perseteruannya ini kerajaan-kerajaan ini mudah sekali diadu domba dan diperalat oleh Hindia Belanda.

Oleh karena itulah artikel ini akan mencoba secara khusus mengkaji dua masalah pokok, yaitu : pertama, mengapa terjadi polarisasi geopolitik kerajaan di Bali pada periode abad XVI sampai XX, yang ditunjukkan oleh faktor internal dari kerajaan-kerajaan di Bali dan kedua, menunjukkan faktor campur tangan Belanda yang mempercepat proses polarisasi geopolitik di Bali.

PEMBAHASAN

1. Dinasti Kepakisan di Bali

Masyarakat Bali percaya bahwa evolusi geopolitik di Bali tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Majapahit. Bukan berarti bahwa tidak ada kebudayaan lain di Bali sebelum datangnya pengaruh Majapahit. Kelompok Pasek misalnya menesuri leluhur mereka kembali pada masa pra Majapahit. Terlebih lagi kelompok Baliaga yang menyatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari penduduk Bali Asli percaya bahwa mereka tidak dikontrol secara langsung oleh Puri yang didasari oleh model Majapahit. Kelompok mereka bahkan menolak kekuasaan yang dipegang oleh raja dan untuk memperkuat posisi ini bahkan mereka menolak sistem kasta (Barth,1993;222-228).

Di pihak lain kitab Negarakertagama memberikan beberapa bukti bagaimana kebudayaan Majapahit menyebar ke Bali. Pada abad ke XIV, Bali adalah bagian dari Majapahit, meskipun hegemoni yang nyata masih belum jelas. Hal ini ditunjukkan bahwa penguasa Bali Kuno seperti dalam prasasti Blanjong memberikan bukti nyata bahwa tidak ada pengaruh India di Bali sebelum abad ke-10. Pada waktu itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi berubah dari bahasa Bali Kuno ke bahasa Jawa Kuno dan tulisan-tulisan Jawa mulai ditiru. Perubahan-perubahan ini dapat dianggap menandai dominasi kebudayaan Jawa yang berlangsung berkenaan dengan perubahan-perubahan politik antara Jawa dan Bali (Creese,1992;6-7). Selanjutnya dalam Babad Dalem disebutkan bahwa sejarah orang Bali dari abad XIV sampai abad XVII menyebutkan bahwa Gadjah Mada yang pada waktu itu menjabat sebagai mahapatih Majapahit, mengangkat

putra keempat Danghhang Kepakisan yakni Dalem Ketut sebagai adipati di Bali dan bergelar Sri Kresna Kepakisan. Ini terjadi karena kekalahan raja Bedahulu, Bali Kuno Maya Denawa. Dinasti baru ini dipusatkan di Samprangan dengan membawa sejumlah lambang kesetiaan untuk menghiasi puri dan sejumlah senjata dan pakaian kebesaran kerajaan yang memberikan konsep perpaduan kekuasaan Jawa dan Bali. Tanda-tanda kebesaran ini sebagai simbol kekuasaan yang sah. Di awal pemerintahan, Sri Kresna Kepakisan menghadapi pemberontakan dari desa-desa Baliaga seperti Batur, Songan, Cempaga, Kedisan, Pinggan, Muntig, Tludu, Kintamani, Serahi, Manikliu, Bonyoh, Taro, Bayan, Sukawana, Tista, Garbawana, Got, Margatiga, Sekul Kuning, Garinten, Lokasrana, Puhan, Buahon, Simbanten, Tulamben, Watudawa, Juntal, Carutcut, Bantas, Kubayan, Watu Wayang, Kedampal, asti dan Datah (Creese, 1992;10). Seluruh desa-desa ini sekarang tersebar di Kabupaten Gianyar, Bangli dan Karangasem. Dalam menghadapi pemberontakan ini disebutkan bahwa disamping mendapat senjata Ki Gadjah Dungkul Dalem Ketut Ngulesir yang menggantikan ayahnya Sri Kresna Kepakisan juga diberikan simbol kekuasaan dan keris Ki Lobar.

Selanjutnya, dibantu oleh para pengikut Gajah Mada yakni Arya Damar, Dalem Ketut Ngulesir berhasil memadamkan pemberontakan dari desa-desa Baliaga ini. Sebagai hadiahnya setelah pemberontakan berhasil dipadamkan maka Arya Damar diberikan gelar Arya Kenceng dan berkuasa di Tabanan, akan tetapi statusnya lebih rendah dari penguasa Gelgel. Dalam perkembangan selanjutnya Arya Kenceng membagi-bagikan tanah pada trah Arya yang lainnya seperti : Arya Sentong di Pacung, Arya Beleteng di Penatih, Arya Waringin di Kapal, Arya Belog di Kaba-Kaba, Arya Kepakisan di Abiansrmal dan Arya Binculuk di Tangkas (Berg, 1927;133)

I Dewa Ketut Ngulesir dipandang sebagai pelanjut dinasti Kepakisan, maka raja ini bergelar Dalem Ketut Kresna Kepakisan yang memerintah selama kurang lebih 20 tahun (1380-1400) untuk selanjutnya secara berturut-turut Bali diperintah oleh Dalem Watu Renggong dari tahun 1400-1500 (koleksi naskah A.A. Made Cakra yang masih harus diuji kebenarannya). Pemerintahan Dalem

Waturenggong pada abad XVI (sekitar tahun 1550) merupakan awal lepasnya ikatan dan pengaruh Majapahit terhadap Kerajaan Bali seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit oleh Kesultanan Islam di Jawa. Pada masa ini Gelgel dengan pasukan Dulang Mangapnya berhasil menguasai kerajaan Blambangan diujung timur Pulau Jawa. Raja ketiga yang memerintah selanjutnya adalah putra tertua Dalem Waturenggong yang bergelar Dalem Bekung. Karena usianya yang masih muda dimasa pemerintahannya sehari-hari ia dibantu oleh pamannya Dewa Gedong Artha, I Dewa Nusa, I Dewa Pangedangan, I Dewa Anggungan dan I Dewa Bangli (Westa, 2011,22-24).

Masa pemerintahan Dalem Bekung (tahun 1550-1580) adalah awal kesuraman kerajaan Gelgel. Oleh karena pada masa pemerintahan raja ini terjadi banyak masalah dan kesulitan. Wilayah kerajaan Gelgel diluar Bali yang pernah dikuasai Dalem Waturenggong satu persatu melepaskan diri akibat perkembangan politik paska keruntuhan Majapahit. Berkembangnya kesultanan Islam menyebabkan wilayah kekuasaan yang berada diluar pulau jatuh ketangan penguasa baru. Pemberontakan juga terjadi di dalam kerajaan yang dilakukan oleh Gusti Batan Jeruk atas ajakan I Dewa Anggungan yang tiada lain adalah pamannya sendiri. Pemberontakan Batan Jeruk nyaris meruntuhkan Gelgel, sebelum Arya Kubon Tubuh yang setia kepada Dalem mampu memadamkan pemberontakan Batan Jeruk. Setelah meredanya pemberontakan I Gusti Batan Jeruk menyusul pemberontakan yang dilakukan oleh Krian Pande Bhasa sebagai pembalasan kekalahan I Gusti Batan Jeruk. Dan pemberontakan ini pun dapat dipadamkan dengan terbunuhnya Krian Pande Bhasa. Karena situasi di Gelgel kacau maka diangkatlah I Dewa Segening sebagai raja ke IV menggantikan kakaknya Dalem Bekung. Dalam hal ini Kerajaan Bali harus berhadapan dengan pesatnya perkembangan kekuasaan politik raja Makasar Bone yang berhasil melakukan perluasan kekuasaan sampai ke pulau Sumbawa dan Lombok timur. Di pihak lain, di barat Bali berhadapan dengan perluasan kekuasaan Kerajaan Mataram yang sudah sampai ke Pasuruan. Periode ini diperkirakan terjadi diantara tahun 1580-1665. Dengan demikian Bali menghadapi tantangan dari dua arah yakni dari timur dan dari barat. Setelah itu diangkatnya Dalem Segening menggantikan

Dalem Bekung sebagai raja, justru campur tangan VOC di Mataram dan Makasar harus berhadapan dengan kerajaan-kerajaan lokal, sehingga pada masa pemerintahan Dalem Segening kembali kerajaan Sasak (Lombok) dan Sumbawa mengakui kekuasaan Gelgel. Hal yang menonjol lainnya adalah pada saat ini juga Dalem Segening menyebarkan golongan Ksatria Dalem hampir ke seluruh Bali. Dan gelar Ksatria sudah dibagi-bagi mulai dari Ksatria Dalem, Ksatria Pradewa, Ksatria Pungakan, Ksatria Prasanghyang dan Ksatria Prabagus (Bandingkan Wikarman,1998;63-68 dengan Pemda Klungkung.2011;31-32).

Setelah masa pemerintahan Dalem Segening berakhir, akhirnya Gelgel diperintah oleh Dalem Dimade sekaligus sebagai raja ke V dan terakhir dari kerajaan Gelgel. Saat-saat damai yang dirintis oleh Dalem Segening tidak dapat dipertahankan karena Dalem Dimade terlalu memberikan kepercayaan penuh kepada pengabahnya I Gusti Agung Maruti, sehingga pembesar-pembesar kerajaan lainnya memilih meninggalkan puri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh I Gusti Agung Maruti untuk menggulingkan pemerintahan Dalem Dimade. Dalem Dimade beserta putra-putranya berhasil menyelamatkan diri ke Desa Guliang diiringi 300 orang yang masih setia. Hampir selama 35 tahun Gelgel mengalami kevakuman karena Dalem Dimade mengungsi ke Guliang. Sementara I Gusti Agung Maruti dibiarkan menguasai Gelgel. Hal inilah yang menjadikan Bali terpecah-pecah dan mengakibatkan munculnya beberapa kerajaan seperti : Den Bukit, Mengwi, Gianyar, Badung, Tabanan, Payangan, dan Bangli yang menyatakan kemerdekaan lebih-lebih setelah Dalem Dimade wafat di kraton Guliang. Dengan wafatnya Dalem Dimade para pembesar kerajaan seperti Panji Sakti, Ki Bagus Sidemen dan Ki Jambe Pule menyusun strategi dan kekuatan untuk menyerang I Gusti Agung Maruti dan pengikutnya sehingga tidak sanggup lagi mempertahankan Gelgel. I Gusti Agung Maruti berhasil melarikan diri ke Jimbaran dan kemudian memilih menetap di Alas Rangkan, Gianyar. Kemengangan ini berhasil mengembalikan Dinasti Kepakistan. Untuk itulah diangkat putra bungsu Dalem Dimade, yang bernama Sri Agung Jambe dan atas saran Ki Gusti Sidemen Kraton dipindahkan ke Desa Klungkung dengan nama Kraton Smara Jaya dan Raja memakai gelar I Dewa Agung. Hal ini

mengisyaratkan bahwa ada keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan Majapahit.

2. Campur Tangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Setelah Mataram dan Makasar ditaklukkan secara politik melalui perang dan diplomasi maka VOC mulai melirik Bali sebagai sasaran untuk dikuasai. Pada permulaan abad ke -19 di Bali terdapat sudah terdapat sembilan kerajaan yaitu : Kerajaan Buleleng, Jembrana, Tabanan, Mengwi, Badung, Gianyar, Bangli Klungkung dan Karangasem yang saling terus bertikai berebut kekuasaan. Kondisi ini oleh Creese disebut sebagai struktur pemerintahan galaksi karena delapan kerajaan di Bali tetap mengakui raja tertinggi di Klungkung, tidak lagi sebagai pimpinan politik tetapi Dewa Agung di Klungkung hanya dianggap sebagai pimpinan religious atau sebagai keturunan raja-raja Majapahit. Dampaknya adalah pada tahun 1808 Kerajaan Jembrana ditaklukkan oleh Raja Buleleng dan pada tahun 1818 Jembrana dapat kembali merebut kekuasaannya. Tiga tahun berikutnya 1821 Buleleng kembali merebut Jembrana. Tiga tahun kemudian, yaitu tahun 1821 Buleleng kembali berhasil menguasai Jembrana sehingga sejak itu di Bali ada delapan kerajaan. Karena perseteruan itu pula maka kerajaan-kerajaan kecil yang bertikai ini dengan mudah dapat diperalat pemerintah Kolonial Belanda.

Pada tanggal 28 November 1808 H.W. Daendels mengirim Kapten Van de Whal ke Bali untuk membuat suatu kontrak dengan raja Badung I Gusti Ngurah Made Pemecutan, agar Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dibolehkan merekrut pemuda-pemuda Bali untuk dijadikan prajurit, karena pemuda-pemuda Bali dikenal mempunyai badan yang sehat, berkepribadian jujur, berani dan gagah perkasa dalam peperangan. Untungnya kontrak ini tidak mempunyai implikasi politik karena perjanjian ini tidak pernah dilaksanakan (Westa, 2-11;22-23). Pada tanggal 30 Desember 1826, Raja Badung kembali menandatangani kontrak yang sama, dari pihak Belanda surat kontrak ditandatangani oleh Kapten Wetters. Untuk merekrut calon prajurit dalam rangka Perang Diponegoro. Disamping itu pula pemerintah Hindia Belanda mengangkat P. Dubois sebagai wakil Belanda di Kuta (Agung,1985). Ini menunjukkan bahwa Belanda memang berencana

menguasai Bali, yang diawali dengan melakukan kerjasama di bidang perdagangan. Lalu lintas pelayaran di perairan Bali dianggap kurang aman oleh kapal-kapal Belanda karena terancam oleh “tawan karang”. Tawan karang adalah lembaga hukum adat antar bangsa yang berlaku di Bali dan Lombok, yaitu suatu hak yang dimiliki oleh raja-raja dan rakyat pantai untuk melakukan perampasan terhadap kapal-kapal laut atau perahu yang kandas di pantai. Kapal atau perahu yang terdampar itu boleh ditolong oleh penduduk pantai di wilayah itu, sedangkan penduduk dari wilayah lain dilarang (Vollenhoven, 1933, 407-408). Sejak tahun 1836 Bali mulai menarik perhatian dari Batavia. Hubungan antara Singapura dengan Bali dapat berjalan dengan lancar. Barang dagangan dari Bali dan ke Bali mengalami kemajuan yang pesat setelah sebuah perusahaan dagang *de Nederlandsche Handelmaatschappij* (NHM) berdiri di Kuta pada tanggal 1 Agustus 1839. Berdirinya kantor NHM di Kuta mendapat persetujuan raja Kesiman Badung mengindikasikan perdagangan dengan asing semakin maju lebih-lebih setelah diangkatnya Mads. J. Lange oleh raja Badung seorang Denmark menjadi syah bandar di Kuta. Jalan-jalan yang menghubungkan Kuta dengan Tabanan, Mengwi dan Gianyar mulai diperbaiki (Utrecht, 1962,122-123). Perusahaan dagang NHM pada tahun 1843 mulai kalah bersaing dengan Mads. Lange karena dibawah control Mads. Lange yang bekerjasama dengan raja Kesiman Badung maka elit local dan pedagang asing lainnya seperti Cina mulai memegang peranan yang cukup kuat di Kuta, dan Kuta berkembang menjadi pelabuhan Transito. Lalu lintas perdagangan dari daerah bagian timur terutama Lombok semakin ramai dan Kuta menjadi pusat perdagangan di seluruh Bali. Hubungan pribadi yang baik antara Lange dengan raja, pedagang Cina dan pedagang local sangat berperan menunjang perdagangan. Situasi politik di Bali berubah ketika tahun 1848-1849 meletus Perang Buleleng kemudian dilanjutkan dengan Perang Jagaraga. Kondisi ini sangat mempengaruhi perdagangan di Kuta .Setelah Buleleng dikuasai oleh Belanda maka pusat perdagangan berpindah ke Buleleng di Bali Utara dan di selatan berpindah ke Padangbai. Meletusnya perlawanan rakyat Buleleng dan Perang Jagaraga sebagai politik intervensi

Belanda telah dimulai dengan raja-raja Bali. Lalu dengan politik adu domba, secara perlahan-lahan Belanda berhasil menaklukkan raja-raja Bali.

Waktu yang diperlukan memang cukup panjang untuk menaklukkan Bali. Berdasarkan surat-surat perjanjian yang ditunjukkan antara kerajaan-kerajaan Bali dan Lombok dengan pemerintah Hindia Belanda, sebagaimana dilakukan Raja Klungkung tanggal 13 Juli 1849 misalnya terlihat jelas usaha penaklukan itu dalam kalimat “bahwa kita Ratu Dewa Agung Putra Susuhunan di atas Pulau Bali dan Lombok mengaku kita punya Kerajaan Klungkung ini adalah sebagian dari tanah Hindia Belanda dan oleh sebab itu ada di bawah pemerintahan Tanah Belanda yaitu Tanah Nederland. Lemahnya kondisi internal kerajaan-kerajaan di Bali semakin diperparah ketika Kerajaan Klungkung hampir tidak pernah berhenti bermusuhan dengan Karangasem atau Gianyar. Kedua kerajaan ini menjepit kekuasaan Kerajaan Klungkung sehingga menjadi semakin sempit. Di satu pihak Karangasem sudah bisa menunjuknya kegemilangannya dengan menguasai Lombok sejak tahun 1692, ambisi untuk menguasai Pulau Bali dilanjutkan dengan menundukkan raja-raja lainnya di Bali, yakni Beleleng. Selanjutnya Kerajaan Mengwi yang sebelumnya berhasil menguasai Jembrana berhasil dikalahkan oleh persekutuan Karangasem Buleleng untuk menguasai Jembrana di tahun 1800. Pada Abad ke 19 Kerajaan Karangasem dibawah raja Gusti Gde Karangasem bahkan sudah berhasil memegang hegemoni kekuasaan di Bali dan Lombok (Agung, 1989; 267).

Solidaritas yang ditunjukkan oleh kerajaan di Bali setelah terpecah-pecah secara politik, terjadi ketika terjadi perang Buleleng tahun 1848 dan 1849 yang dilanjutkan dengan Pertang Jagaraga. Kerajaan-kerajaan Bali dengan laskarnya ikut membantu Patih Jelantik, setelah Patih Jelantik mengirimkan surat permohonan bantuan kepada susuhunan di Klungkung dan direspon oleh raja-raja Bali dengan ditunjukkannya solidaritas Bali dengan mengirimkan pasukan bantuan ke Buleleng. Namun dengan segala keterbatasannya baik secara peralatan militer maupun tentara akhirnya pasukan Bali kalah dalam Puputan Jagaraga. Setelah itu sekalipun ancaman Belanda sudah tampak di depan mata, keinginan diantara kerajaan-kerajaan yang sudah terpecah-pecah untuk saling

menguasai di Bali tetap tidak hilang. Penguasa kerajaan di Bali masih berkuat dengan konflik-konflik antar kerajaan yang tidak pernah habisnya sampai akhir abad XIX.

Hal ini tampak ketika Gianyar secara terus menerus juga ingin memperlebar wilayah kekuasaannya dan momen itu didapat ketika bersama-sama Badung, dan Tabanan berhasil menghancurkan Kerajaan Mengwi di tahun 1891. Setelah itu seluruh bekas wilayah Kerajaan Mengwi dibagi-bagi diantara pemenang perang. Satu contoh wilayah Carangsari yang sebelum Perang Mengwi merupakan bagian wilayah Mengwi, pada tahun 1893, tepatnya dua tahun setelah Kerajaan Mengwi jatuh ke tangan koalisi Badung, Tabanan dan Gianyar, penguasa Puri Carangsari yang diikuti oleh Sayan, memilih bergabung dengan Ubud. Alasannya, karena Ubud sedang tumbuh menjadi satu kekuatan, apalagi kemudian dapat menguasai bagian timur bekas Kerajaan Mengwi. (Nordholt,1996,196). Ubud saat itu merupakan daerah kepunggawaan dibawah Tjokorde Gde Sukawati, orang yang sangat berjasa mengalahkan seorang Manca bernama Tjokorde Gde Oka Negara dari Kemancan Negara, Gianyar yang memberontak kepada kerajaan induknya Gianyar (Agung, 1985;419-420). Dalam pertempuran itu, Tjokorde Gde Sukawati mampu mengerahkan 18.000 pengikut dan berhasil merebut 40 hingga 130 desa (Nordholt, 1992;200). Setelah Negara dapat dikalahkan, wilayah kekuasaannya dibagi tiga menjadi Punggawa Peliatan, Ubud dan Tegallalang. Wilayah terbesar dikuasai oleh Manca Ubud Tjokorde Gde Sukawati, karena dialah yang paling berjasa dalam peperangan tersebut. Dia mendapat bagian semua sawah milik Tjokorde Gde Oka Negara dan bahkan istananya sekaligus. Dengan demikian, Tjokorde Gde Sukawati menjadi penguasa yang sangat berwibawa, mempunyai kedudukan yang kuat dan sangat disegani, mempunyai banyak desa, dan sawah yang luas. Karena itu, kedudukannya berubah menjadi punggawa Ubud yang berdiri sendiri. Bagi orang Mengwi yang tidak ingin menyerahkan diri kepada penguasa Badung dan Tabanan, akan lebih senang menyerahkan diri ke Puri Carangsari, yang berarti pula mereka akan mendapat perlindungan dari Puri Ubud. Di sisi lain juga ada pengungsi lain dari wilayah Buduk yang mengungsi secara terpencar ke wilayah

Desa Nungnung, Balangan, Basangbe, Carangsari dan Mungsengan. Wilayah Bekas Kerajaan Mengwi di bagian selatan seperti: Kerobokan, Kuta, Sanur, Jimbaran akhirnya dikuasai Kerajaan Badung sekitar tahun 1886-1893. Kerajaan Badung yang dulunya merupakan wilayah bawahan Mengwi menjadi satu kerajaan besar di akhir abad ke -19, Sedangkan wilayah di sebelah barat Mengwi yang dibatasi oleh sungai mulai dari daerah Kaba-Kaba, Selingsing, Beraban, Suralaga, Kediri, Belayu, dikuasai oleh Tabanan. Di Distrik Gianyar, Dewa Manggis, memimpin pemberontakan sengit untuk membebaskan Gianyar dari kekuasaan Klungkung. Setelah tahun 1893, Badung bersekutu dengan Bangli dan Karangasem mengacau Gianyar, dan pada tahun 1904, Bangli menyerang Karangasem dan menghancurkan irigasi di sekitar perbatasan dengan Gianyar.

Simpulan dan Saran

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa telah terjadi polarisasi politik yang diakibatkan oleh adanya struktur yang rapuh dari kerajaan-kerajaan di Bali dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Kerajaan di Bali yang merupakan kelanjutan dari dinasti Kepakisan tidak bisa bertahan ditengah konflik-konflik internal yang berkepanjangan. Di antara kerajaan-kerajaan kecil, mereka saling berebut kepentingan untuk memunculkan diri sebagai pemegang hegemoni politik di Pulau Bali. Kondisi ini didukung pula oleh munculnya penguasa baru dari kekuasaan Islam yang baru berkembang setelah kejatuhan Majapahit yakni Mataram dan Makasar. Bali yang belakangan baru dilirik oleh pemerintah Hindia untuk menguasai jalur perdagangan ke Indonesia timur tidak menyadari bahwa ancaman dari luar sudah datang di depan mata. Kondisi itu menyebabkan Bali menjadi sangat rapuh ketika berhasil dihancurkan secara militer oleh Belanda di awal abad ke XX melalui perang Puputan Badung di tahun 1906 dan Puputan Klungkung di tahun 1908.

Berkaca dari pengalaman inilah nampaknya polarisasi kerajaan di Bali pada abad XVI sampai abad XX bisa menjadi satu acuan untuk lebih mensinergikan Bali diantara Kabupaten/kota yang ada sehingga perebutan kue

ekonomi dan politik tidak menjadi satu alasan untuk saling mengabaikan kepentingan yang lebih besar yaitu manusia dan kebudayaan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Agung,1985, AAG. Putra” Kuta Pada Abad XIX” dalam *Bahasa,Sastra, dan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Agung ,1989; AAG. Bali Pada Abad XIX, Bali Pada Abad XIX, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Ardana,1994, “Bali dalam Kilasan Sejarah” (dalam *Dinamika masyarakat dan Kebudayaan Bali*, hlmaman 17-380, Denpasar : Offset Bali Post.

Barth,199,; *Balinese World*, Chicago dan London: The University of Chicago Press.

Berg, 1927, *De Middleljavansche Historische Traditie*,. Santpoort : C.A. Mees.

Creese,1992, “ The Early Balinese Polity : interpreting The Evidence” *Paper* disampaikan pada The Ninth Biennial ASSA Confrence University of New England.

Nordholt-Schulte, Henk ,1996,*The Spell of Power A History of Balinese 1849-1940*. Leiden: KITLV Press

Pemda Klungkung.2011,” Kronik Dinasti Gelgel”, dalam *Sabda Majalah Budaya dan spiritual*, No 06 januari 2011 halaman 31-32.

Sidemen, ida Bagus (et. Al.).1983, *Sejarah Klungkung : Dari Smarapura Sampai Puputan*. Klungkung : Pemerintah daerah Tingkat II Klungkung.

Utrecht, E.,1962. *Sejarah Hukum Internasional di Bali dan Lombok*. Bandung : Sumur Bandung.

C. van Vollenhoven, 1933, *Het Adatrecht van Nederladsch-Indie*, Leiden : Westa, 2011,”Abad Setelah Monarkhi Runtuh”, dalam *Sabda Majalah Budaya dan Spriritual No 06 Januari 2011*,halaman 21-24.

Wikarman,1998, *Leluhur Orang Bali Dari Dunia Babad dan Sejarah*, Surabaya : Penerbit Paramita.
